

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR)

Priskila Yuliana
yulianapriskila@gmail.com
Akhmad Riduwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze and find out the effect of Local-owned Source Revenue, General Allocation Funds, and Specific Allocation Funds on the capital expenditure of Local Government in East Java province during 2016-2020. The capital expenditure is a local expenditure that needed to be considered as it relates to the infrastructure and general facilities development. Moreover, higher capital expenditure would facilitate the local government's performance. The research was quantitative. Furthermore, the data were secondary, in the form of Budget Realization Reports which were taken from the Audit Board of East Java province. The data analysis technique used multiple linear regression. Additionally, the result concluded that Local-owned Source Revenue had a positive effect on capital expenditure. However, General Allocation Funds did not affect capital expenditure. On the other hand, Specific Allocation Funds had a positive effect on the capital expenditure of the Local Government in East Java province.

Keywords: local-owned source revenue, general allocation funds, specific allocation funds, capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020. Belanja Modal adalah belanja daerah yang perlu diperhitungkan karena berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, belanja modal yang tinggi akan dapat membantu kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, lalu Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal

PENDAHULUAN

Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang menjadi pedoman pembagian sumber daya dalam APBD pada awalnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan DPR, lembaga legislatif. Proses pengalokasian dana untuk belanja modal memiliki konsekuensi politik. Pendekatan yang berpusat pada masyarakat untuk menyediakan layanan pemerintah, masyarakat dapat mengontrol penggunaan sumber daya yang berasal dari pendapatan dan belanja daerah (Sari dan Ningsih, 2018).

Penyusunan alokasi dan pemenuhan APBD merupakan tugas pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Hermawan (2016), APBD terdiri dari beberapa unsur, antara lain pendapatan asli

daerah (PAD), dana perimbangan DAU dan DAK, dan belanja yang meliputi belanja. Daerah diberikan keleluasaan untuk menggali potensinya sebagai sumber pendapatan daerah untuk mendukung belanja pelayanan publik daerah melalui desentralisasi fiskal.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah dan pembangunan daerah merupakan tolok ukur otonomi suatu daerah. Pendapatan daerah berasal dari BUMD, pajak daerah, dan retribusi daerah (Kuncoro, 2014:7).

Terjadi ketimpangan anggaran di antara sebagai akibat dari perbedaan kemampuan masing-masing daerah dalam mendanai kegiatannya secara finansial. Untuk mencapai desentralisasi dan mengatasi ketidakseimbangan anggaran ini, pemerintah mentransfer dana dari APBN untuk membayar kebutuhan daerah. Dana Penyaluran Umum (DAU), salah satu dana perimbangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, disalurkan dengan memperhatikan keadilan dan kepedulian yang selaras dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Keberhasilan pengelolaan APBD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah. Menurut Nurzen (2016), kualitas pelayanan publik meningkat seiring dengan peningkatan investasi modal. Konsekuensinya, dengan memperluas alokasi Belanja. Besaran belanja daerah yang dapat diubah oleh pemerintah daerah diperkirakan dapat dilakukan baik melalui penanaman modal maupun sumber pendapatan daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilaporkan secara terpisah, demikian pula pendapatan asli daerah lain yang diperbolehkan, semuanya dianggap sebagai pendapatan asli daerah (Novalista, 2016).

Pertimbangan belanja modal, salah satu belanja daerah, diperlukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dalam jangka panjang. Pendapatan daerah, menurut Juniawan (2018), terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang dibentuk bagi PEMDA untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya melalui bangunan publik yang selanjutnya dapat meningkatkan Belanja Modal. Kinerja banyak entitas pemerintah dapat dipengaruhi oleh investasi modal yang rendah. Perbaikan ekonomi tergantung pada belanja modal, sehingga dalam situasi ini sangat penting untuk campur tangan dalam pelayanan pemerintah, terutama tingkat pencairan anggaran yang rendah (Rifai, 2017).

Menurut data yang diberikan oleh FKBN, hal terjadi di Provinsi Jawa Timur yang proporsi belanja modalnya 9,91%, jauh di bawah mandat Menteri Dalam Negeri mengenai standar penyusunan APBD tahunan, minimal proporsi anggaran. Belanja modal adalah 25% sampai 30% dari total belanja. Hal ini menunjukkan kebiasaan belanja di Jawa Timur saat ini tidak sehat dan dapat menurunkan produktivitas. Perlu untuk meningkatkan belanja modal yang benar-benar untuk kepentingan publik guna memberikan ruang keuangan yang cukup untuk proyek-proyek komunitas yang besar (Sabdanews, 2019).

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah diuraikan di atas, tantangan dalam penelitian ini: (1) Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal?, (2) Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal?, (3) Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota di Daerah Provinsi Jawa Timur, (2) Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pemerintah Kota dalam Belanja Modal Daerah Provinsi Jawa Timur, (3) Bagaimana belanja modal pada pemerintah kota di Daerah Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh dana alokasi khusus (DAK).

TINJAUAN TEORITIS

Secara lebih mendalam akan diuraikan landasan teorinya, mendefinisikan penelitian ini dan penelitian sebelumnya lainnya yang telah diperbarui dengan referensi atau informasi baru yang dikumpulkan selama penyelidikan. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rencana keuangan satu tahun, diputuskan oleh pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah memutuskan prioritas alokasi setelah berkonsultasi dengan legislatif, DPRD, pemerintah daerah dapat menggunakan APBD untuk berkomunikasi dengan konstituennya (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2017).

Sedangkan menurut Halim (2014:15) Berikut adalah komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD): penjelasan lengkap tentang rencana kegiatan suatu daerah, sumber pendapatan yang berfungsi sebagai tujuan minimum untuk membayar pengeluaran, jumlah maksimum yang dapat dikeluarkan, jumlah jenis kegiatan dan proyek yang akan dilakukan, dan jumlahnya yang sesuai; Dalam kebanyakan kasus, jangka waktu anggaran adalah 1 tahun.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No 33 Tahun 2004, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dan dikumpulkan sesuai peraturan perundangan berdasarkan peraturan daerah. Penerimaan pendapatan daerah merupakan kumpulan pos pajak, seperti pos pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan bukan pajak, seperti penerimaan perusahaan daerah, pos penerimaan investasi, dan pos pengelolaan sumber daya alam. Menurut Bastian (2013: 49). Alokasi anggaran belanja modal bisa berubah seiring dengan naiknya PAD.

Peningkatan belanja modal diantisipasi untuk meningkatkan pelayanan publik dengan aksesibilitas yang lebih besar, yang akan meningkatkan PAD dan jumlah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Keberadaan pendapatan asli daerah dimanfaatkan sebagai modal untuk mendukung belanja daerah dan juga dijadikan tanda keberhasilan daerah dalam mewujudkan daerah otonom. Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian penting dari pendapatan daerah yang memberikan kontribusi pertumbuhan daerah lebih cepat. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah (Permendagri No. 33 Tahun 2019).

Dana Alokasi Umum

Menurut UU No 23 Tahun 2014, uang Alokasi Umum adalah Pendapatan APBN digunakan untuk menyediakan dana dengan tujuan mewujudkan desentralisasi dengan menyebarkan sumber daya keuangan ke seluruh daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Seluruh besaran DAU yang diamanatkan UU No. 33 Tahun 2004 harus 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang tercantum dalam APBN. Halim (2012) mengatakan terdapat cara untuk menghitung Dana Alokasi Umum sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu: (1) Sekurang-kurangnya 25% dari uang yang diperoleh di dalam negeri, sebagaimana ditentukan oleh APBN, telah dijamin untuk Dana Alokasi Umum, (2) Ketentuan pelaksanaan di atas, Kabupaten/Kota masing-masing mendapat 10% dan 90% dari dana alokasi umum yang dibagi antara provinsi dan daerah, (3) Dana Alokasi Umum ditujukan pada daerah, Kabupaten/Kota yang tertentu saja melakukan penetapan dengan adanya perkalian pada hasil dari Dana Alokasi Umum ditujukan kepada daerah, Kota yang sudah ditetapkan oleh APBN sesuai porsi pada daerah, Kota yang sudah ditentukan, (4)

Adanya porsi pada setiap daerah, Kabupaten/Kota seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu merupakan suatu bagian dari bobot daerah, Kabupaten/Kota.

Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No 23 Tahun 2014, pendapatan APBN digunakan untuk mendanai uang yang disalurkan ke daerah tertentu dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah. Sesuai mandat fungsi APBN, pemerintah daerah diberikan uang alokasi khusus untuk membantu urusan dan kegiatan khusus daerah. UU No. 33 Tahun 2004 memberlakukan standar DAK, antara lain harus sekurang-kurangnya 10% dari DAK yang diterima dipasok oleh daerah penerima DAK dalam bentuk dana pendamping, dan anggaran direncanakan dalam APBD tahun berjalan. yang telah ditetapkan pemerintah sebagai kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pemanfaatan DAK difokuskan pada infrastruktur dan fasilitas dasar pelayanan masyarakat (investasi dalam penciptaan, perolehan, peningkatan, dan pemeliharaan real estate dan infrastruktur untuk pelayanan publik). Pembinaan penggunaan Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang telah diperoleh melalui alokasi belanja modal.

Menurut Halim (2014:16) Melalui APBN, dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat disalurkan kepada Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disalurkan ke daerah-daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus di sana sesuai dengan pedoman prioritas nasional. Menurut Halim (2014) mengatakan Dana Alokasi Khusus mempunyai suatu tujuan penting dalam membiayai seluruh keperluan kegiatan yang bersifat dasar, kegiatan seperti program nasional dalam bidang kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, pekerjaan, pemerintahan, keluarga berencana, sarana maupun prasarana. Keberadaan Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pembangunan seperti perjalanan dinas dan pengeluaran lainnya Dana Alokasi Umum akan sepenuhnya digunakan untuk Belanja Modal guna memajukan dan mensejahterakan masyarakat dengan fasilitas yang ada di masyarakat. Sedangkan menurut Suparmoko (2013:337) Dana Alokasi Khusus yang berasal dari APBN yang telah dilakukan pengalokasiannya kepada daerah yang telah ditentukan dalam skema pembiayaan kegiatan desentralisasi.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lain yang ditetapkan pemerintah pada saat aset digunakan untuk kelangsungan, bukan -penjualan operasi unit kerja. Definisi ini berasal dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007.

Hoesada (2016:238) menjelaskan baik keluarga maupun individu tidak memenuhi syarat untuk belanja modal. Belanja modal harus terhubung dengan layanan publik agar dapat diimplementasikan, ini adalah salah satu indikator efektif bagaimana pemerintah daerah menggunakan anggarannya dalam skenario ini. Akibatnya, itu tidak dapat ditargetkan pada kelompok atau orang tertentu.

Mohammed (2015) serta Dewi dan Budhi (2015) juga berpendapat Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aset tetap dan menawarkan keuntungan jangka panjang. Pembangunan fasilitas umum merupakan salah satu kegiatan belanja modal yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan daerah dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah.

Badan Pusat Statistik (2019:17) belanja modal sebagai biaya yang dikeluarkan untuk perolehan, pengembangan, atau pemeliharaan aset tetap berwujud dengan masa manfaat, serta untuk penggunaan jasa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan dan prakarsa pemerintah. Perolehan tanah, mesin besar, alat angkut, alat bengkel, alat kantor,

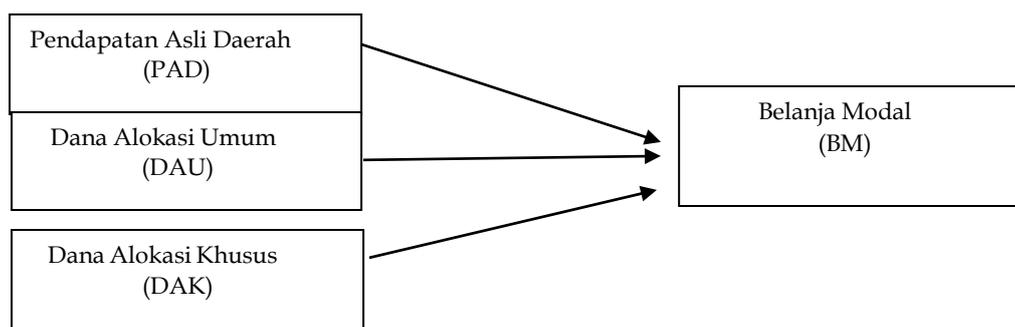
komputer, furniture, alat dapur, dekorasi rumah, alat studio, alat komunikasi, pengukuran, alat kesehatan, alat laboratorium, pembangunan jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/perpustakaan, seni, dan fotografi adalah bagian dari proses penciptaan aset.

Penelitian Terdahulu

Pertama, Hairiyah, Lewi Malisan, dan Zaki Fakhroni (2017) menunjukkan hasil DAU berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap belanja modal, DAK berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal, PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja modal. Sesudah pemekaran DAU berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Kedua, Henri Paulus Gerungan, David Paul Elia Saerang, dan Ventje Ilat (2017) menunjukkan hasil PAD terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap BM, DAU tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap BM, DAK menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap BM.

Rerangka Pemikiran

Kerangka kerja yang diberikan dalam penelitian ini dapat disatukan sebagai berikut dengan menggunakan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran
 Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Sektor pendapatan daerah menjadi krusial menunjukkan suatu daerah dapat mendukung belanja pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017:33). Menurut Nurzen (2016), variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang baik dan besar terhadap belanja modal. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan pajak daerah, akan meningkatkan belanja modal tahunan. Hal ini mengindikasikan kemandirian keuangan daerah akan meningkat di masa mendatang yang akan berdampak pada kebutuhan dana perimbangan yang seringkali diberikan untuk menutupi kekurangan anggaran di pemerintah daerah. Berdasarkan landasan teoritis dan hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

UU No 33 Tahun 2004, pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah, berpengaruh terhadap bagaimana sumber keuangan negara didistribusikan kepada pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Menurut penelitian Yawa dan Runtu (2015), dana alokasi umum dan faktor belanja modal memiliki hubungan yang menguntungkan. Penelitian serupa oleh Mubasiroh (2018) mengungkapkan adanya dampak yang menguntungkan dari dana alokasi umum terhadap variabel belanja modal. Menurut penelitian Sulistyorini dari tahun 2018, ada hubungan yang menguntungkan antara uang yang dialokasikan secara umum dan belanja modal. Asumsi berikut dihasilkan dari landasan teoritis dan data empiris yang disajikan di atas:

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal

Hasil penelitian Nuarisa (2013) menunjukkan Untuk program nasional di daerah, seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan upaya lingkungan, digunakan keterkaitan DAK dan belanja modal. yang memiliki dampak manfaat yang besar terhadap belanja modal. Menurut penelitian Palealu (2013), DAK mempengaruhi belanja modal. Rahmawati dan Tjahjono (2018) menunjukkan Dana Alokasi Khusus dan naik turunnya DAK tidak memiliki dampak yang terlihat terhadap belanja modal. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

H₃ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)

Studi kuantitatif semacam ini menggunakan data statistik, karakteristik, dan pola interaksi antar variabel untuk menggambarkan fenomena empiris. Bentuk penelitian ini disebut sebagai penelitian komparatif, dan merupakan penyelidikan ilmiah berbasis perbandingan. Penelitian yang membandingkan antara dua variabel disebut sebagai penelitian komparatif. Menyelidiki hubungan kausal potensial dan melihat kembali elemen penyebab potensial melalui data spesifik untuk memahami signifikansinya adalah tujuan penelitian komparatif. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 merupakan sumber data sekunder untuk penelitian ini. Sumber informasi adalah website Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R Square) dan uji t parsial, analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 13.0 digunakan sebagai pendekatan analisis data dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran hasil tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Teknik Pengambilan Sampel

Demografi penelitian adalah pemerintahan kota di Provinsi Jawa Timur antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Sebagai teknik pengambilan sampel, tujuan purposeful sampling adalah mengambil sampel dari populasi berdasarkan standar yang telah ditentukan. Salah satu kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur harus sudah mengajukan data laporan realisasi APBD di website Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (<https://djpk.kemenkeu.go.id>). Studi ini mengumpulkan sampel dari sembilan kota di wilayah administratif Jawa Timur antara tahun 2016 dan 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk analisis. Dengan mengkaji makalah atau data yang bersangkutan, kemudian mencatat dan melakukan perhitungan dengan memanfaatkan data yang terkumpul, maka data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metodologi ini. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah

salah satu sumber eksternal dari mana data statistik diperoleh dan digunakan. Informasi bersifat objektif dan terukur, berbentuk angka.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk perolehan, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud, seperti tanah, peralatan, bangunan, infrastruktur, jalan, sistem irigasi, dan aset tetap, yang akan digunakan oleh pemerintah dan memiliki masa manfaat minimal 12 bulan. Dengan rumus sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah uang yang diperoleh daerah, yang bergantung pada undang-undang setempat. Penerimaan dari laba perusahaan daerah (PLPD), hasil pajak daerah (HPD), retribusi daerah (RD), dan penerimaan lain yang sah (LPS) merupakan PAD. Keempat komponen ini dihitung:

$$PAD = HPD + RD + PLPD + LPS$$

Dana Alokasi Umum

Adalah uang yang dipasok dari pendapatan APBN dengan tujuan mengalokasikan sumber daya keuangan secara adil antar daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagai bagian dari prosedur desentralisasi. DAU dialokasikan untuk suatu daerah berdasarkan alokasi fundamental dan kekurangan anggaran. Dana daerah bersumber dari PAD dan Dana Bagi Hasil bersumber dari kemampuan fiskal daerah. Untuk mendeklarasikan DAU daerah kabupaten atau kota:

$$DAU = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Pemerintah Pusat mentransfer dana dari pendapatan APBN yang disalurkan ke daerah terpilih secara khusus menghilangkan kesenjangan dalam tingkat pertumbuhan antar wilayah dan layanan antar sektor, serta untuk mendukung inisiatif tertentu seperti penciptaan infrastruktur daerah dan fasilitas fisik yang sesuai dengan tujuan nasional. Peraturan Pemerintahan No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan disebutkan rumus perhitungan mencari DAK (Dana Alokasi Khusus) adalah:

$$KU = (PAD + DAU + DBH - DBRDR) - \text{Belanja Gaji PNSD}$$

Teknik Analisis Data

Adalah metode yang secara metodis menggunakan pendekatan logis dan statistik untuk meringkas, menjelaskan, dan menganalisis data. Analisis mencoba mengubah data yang belum diolah menjadi pengetahuan yang dapat dengan cepat dipahami dan ditafsirkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif

Data responden atau variabel dideskripsikan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif ini yang dilihat dari nilai tertinggi, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Peneliti harus terlebih dahulu memeriksa asumsi sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menilai hipotesis. Uji asumsi klasik ini terdiri atas beberapa pengujian, yaitu:

Uji Normalitas

Adalah untuk menentukan nilai residual standar model regresi terdistribusi secara teratur atau tidak. Uji normalitas Satu Sampel Kolmogorov-Smirnov dan uji P-P Plot adalah prosedur statistik yang digunakan dalam uji normalitas penelitian ini. Jika signifikansinya $> 0,05$ maka data dianggap berdistribusi teratur.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk menguji hubungan antar variabel independen dalam regresi. Model regresi layak menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel independen. Multikolinearitas terlihat pada nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel independen mana yang dapat menjelaskan faktor independen mana. Toleransi setiap variabel yang akan digunakan dalam analisis regresi harus 10%. Secara umum, suatu variabel memiliki masalah multikolinearitas dengan variabel independen lainnya jika VIF lebih dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui terdapat varians yang tidak sama antara residual atau data individual dan pengamatan lain dalam model regresi. Homoskedastisitas dan heteroskedastisitas adalah dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan varians antara residual pengamatan (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas berusaha untuk mengetahui apakah varian dari residual satu pengamatan berbeda dengan yang lainnya. Model regresi terbaik adalah yang tidak heteroskedastis. Pengujian dijalankan dengan memeriksa gambar plot antara residual (SRESID) dan nilai prediksi variabel independen (ZPRED). Heteroskedastisitas tidak ada jika grafik tidak menunjukkan pola reguler yang terlihat dan data terdistribusi secara acak pada nilai pada sumbu Y.

Uji Auto Korelasi

Regresi yang tidak memiliki autokorelasi adalah model regresi yang baik. Model Durbin Watson (uji dw) adalah teknik untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi. autokorelasi ketika variabel error-term pada satu periode memiliki korelasi dengan variabel error-term pada periode lain, maka variabel error-term tidak acak. Ketika asumsi ini dipatahkan, interval kepercayaan hasil estimasi meningkat, melemahkan uji signifikansi. Jika tidak ada autokorelasi saat DW berada, tahap deteksi membandingkan nilai Tabel Statistik Durbin Watson dengan H_0 .

0 (a) dl (b) du (c) (4-du) (d) (4-dl) (e) 4

Keterangan:

H_0 : tidak ada autokorelasi

(a) : daerah menolak H_0 : ada autokorelasi positif

- (b) : daerah ragu-ragu
 (c) : daerah tidak menolak H_0 : tidak ada auto korelasi positif atau negatif
 (d) : daerah ragu-ragu
 (e) : daerah menolak H_0 : ada autokorelasi negatif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi berganda adalah metode statistik untuk menguji hipotesis, dan dipilih konsisten dengan tujuan, sasaran, dan asumsi penelitian. Dalam model prediktif tunggal, analisis regresi berganda menetapkan hubungan antara satu variabel tertentu. Kajian ini dibentuk oleh satu variabel dependen, belanja modal, bersama dengan tiga faktor independen: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Persamaan berikut dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel ini terkait:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$$

Keterangan :

- BM : Belanja Modal
 α : Konstanta
 β : Slope atau koefisien regresi atau intersep
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 DAU : Dana Alokasi Umum
 DAK : Dana Alokasi khusus
 e : Error

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menilai seberapa baik model regresi menjelaskan variasi variabel dependen. Antara 0 dan 1, nilai koefisien determinasi dapat bervariasi. Nilai R^2 berarti variabel independen memiliki kapasitas yang relatif terbatas untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Ghazali (2018) menemukan kekuatan individu dari efek faktor independen pada variabel dependen adalah tujuan dari r Square (R^2). Kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan dengan nilai R^2 mendekati 1, sedangkan pengaruh lemah variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan dengan nilai R^2 sekitar 0. Jika disesuaikan nilai R^2 pada uji empiris negatif, dianggap nol. R^2 dimodifikasi menjadi sama dengan 1 jika sama dengan 1, tetapi jika sama dengan 0 secara matematis disesuaikan menjadi sama dengan $(1-k) / (k-n)$. Jika K melebihi 1, R^2 yang disesuaikan akan negatif.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk memastikan efek gabungan dari variabel independen dan dependen terhadap variabel dependen. Nilai F pada output hasil regresi variabel PAD dan DAK dibandingkan dengan menggunakan SPSS dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). pengujian berikut, dan 10% untuk variabel DAU:

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_k = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- $H_0: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_k = 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Sedangkan pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a) Jika signifikan $< 0,05$ maka H_0 diterima
 b) Jika signifikan $> 0,05$ maka H_0 ditolak.

Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji statistik t, menunjukkan masing-masing variabel independen atau penjelas memberikan kontribusi terhadap variansi variabel dependen. $0,05$ ($=5\%$) adalah cutoff untuk signifikansi. Berikut adalah standar evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Apabila nilai signifikan $\alpha < 0,05$, maka hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
 b. Apabila nilai signifikansi $\alpha > 0,05$, atau $= 0$, maka hipotesis ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Selain membantu memberikan informasi dengan cepat tentang variabel penelitian yang dapat digunakan untuk memastikan karakteristik sampel dalam penelitian, analisis statistik deskriptif berguna untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Variabel dependen, belanja modal, dan variabel independen dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), keduanya dijelaskan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil analisis statistik deskriptif yang dilakukan adalah:

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	45	25,06	28,64	26,1913	0,88321
Pendapatan Asli Daerah	45	25,42	29,31	26,4202	1,06680
Dana Alokasi Umum	45	26,65	27,86	27,0397	0,36264
Dana Alokasi Khusus	45	24,80	26,76	25,4376	0,52424
Valid N (listwise)	45				

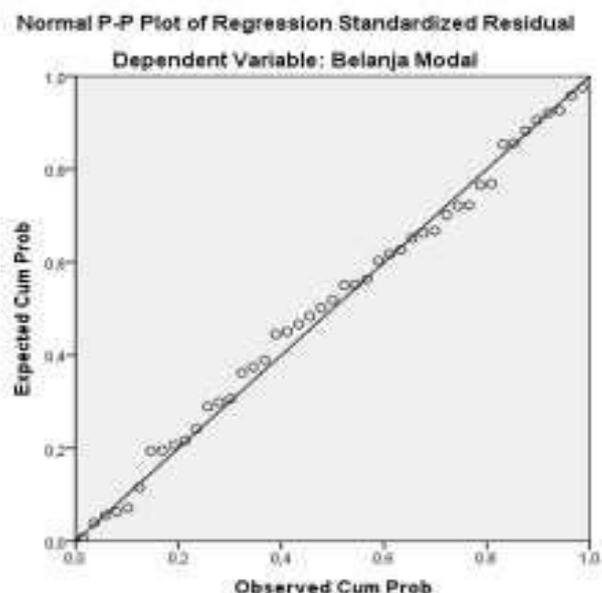
Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Tabel 1 memperlihatkan total sampel sebanyak 45 sampel, dengan data berasal dari laporan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2016 - 2020. Dari tabel diatas dapat ditunjukkan apabila setelah mengelola data akan menghasilkan nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum serta standar deviation dimana setelah melakukan pengolahan data maka mendapatkan hasil kesimpulan yaitu: (1)Pendapatan Asli Daerah berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 1 diatas rata-rata Pendapatan Asli Daerah senilai 26,4202 dengan nilai terendah 25,42 ada pada Kota Batu di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2016. Sedangkan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tahun 2019 memiliki Pendapatan Asli Daerah dengan nilai maksimal 29,31. Selain itu, standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, yaitu 1,06680, menunjukkan distribusi data cenderung normal dan temuannya akurat. (2) Dana Alokasi Umum berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 1 diatas diketahui rata-rata Dana Alokasi Umum senilai 27,0397 dengan nilai terendah 26,65 ada pada Kota Mojokerto di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2019, Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur merupakan penerima Dana Alokasi Umum dengan nilai maksimal 27,86. Selain itu, memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil yaitu 0,36264 dari nilai rata-rata, menunjukkan distribusi data normal. (3) Dana Alokasi Khusus berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 4 diatas diketahui rata-rata Dana Alokasi Khusus senilai 25,4376 dengan nilai terendah 24,80 ada pada Kota Batu di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2020.

Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya maksimal 26,76. Memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata 0,52424, menunjukkan distribusi data lebih cenderung mengikuti distribusi normal dan memberikan hasil yang menguntungkan. (4) Belanja Modal berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 1 diatas diketahui rata-rata Belanja Modal senilai 26,1913 dengan nilai terendah 25,06 ada pada Kota Pasuruan di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Sedangkan Belanja Modal yang memiliki nilai maksimum 28,64 ialah Kota Surabaya di wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Hal juga memperlihatkan nilai standar deviasi yang lebih rendah 0,88321 dari nilai rata-rata (mean) distribusi data cenderung normal.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menentukan variabel residual standar model regresi terdistribusi secara teratur atau tidak. Jika anggapan ini dipatahkan, meskipun hanya sejumlah kecil sampel yang diuji, uji statistiknya tidak benar. Dengan menggunakan deteksi analisis grafik dapat mendeteksi adanya data yang terdistribusi dengan normal maupun tidak. Uji normalitas ini membandingkan distribusi kumulatif distribusi normal menggunakan analisis grafik plot probabilitas normal. Berikut hasil uji normalitas dengan uji normal probability plot:



Gambar 2
Hasil SPSS Grafik Normal P-P Plot
Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan gambar 2 pada hasil uji normalitas dengan pendekatan grafik diatas dapat dilihat hasil grafik uji normalitas menunjukkan memenuhi adanya uji asumsi normalitas, sama adanya penyebaran pada arah diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh itu hasil dari gambar diatas menunjukkan data terdistribusi normal dan model regresi dapat memenuhi adanya uji asumsi normalitas. Jika hasilnya Asymp. Sig. >0,05, uji normalitas juga menggunakan uji statistik non parametrik atau Kolmogorov-Smirnov, yaitu nilai residual atau data yang berdistribusi normal. Namun, jika Asymp. Sig. 0,05 dan nilai sisa tidak normal. Hasil uji normalitas yang dilakukan adalah:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,34839781
Most Extreme Differences	Absolute	0,065
	Positive	0,048
	Negative	-0,065
Test Statistic		0,065
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat Hasil uji Kolmogorof-Smirnov menampilkan nilai Asymp. Sig. 0,200 (>) dari 0,05. Hal ini menunjukkan residual data terdistribusi secara teratur, atau asumsi kenormalan terpenuhi untuk Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan pada variabel independen untuk menetapkan model regresi yang akan digunakan untuk memperkirakan hubungan . Model yang sehat tidak memiliki hubungan antara variabel independen. Faktor yang menyebabkan multikolinieritas dapat diidentifikasi dengan menambahkan nilai toleransi < 0,1 atau nilai VIF lebih dari 10. Hasil uji multikolinearitas yang ditentukan adalah:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients

Mode	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan Asli Daerah	0,110	9,107
Dana Alokasi Umum	0,125	8,018
Dana Alokasi Khusus	0,180	5,565

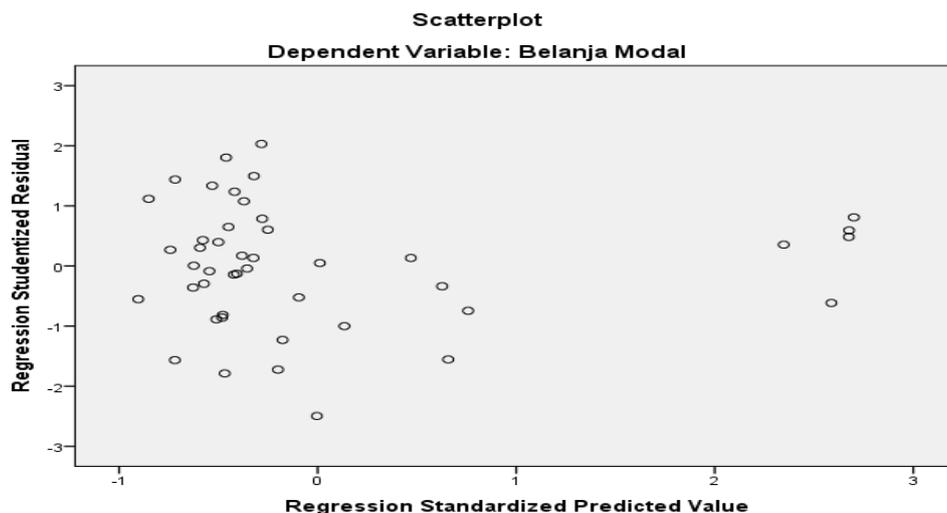
Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Tabel 3 menunjukkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak ada tanda-tanda multikolinearitas untuk salah satu variabel, dan nilai toleransi untuk PAD, DAU, dan DAK semuanya > 0,1 dan nilai VIF 10. Tidak ada multikolinearitas antara variabel independen penelitian dan faktor intervening.

Uji Heteroskedastisitas

Adalah untuk mengetahui terdapat pertidaksamaan varian antara residual pengamatan yang berbeda dalam model regresi. Seharusnya dengan menggunakan model yang baik agar tidak mengandung terjadinya heteroskedastistas yaitu variance serta residual yang berasal dari pengawasan satu menuju pengawasan berbeda yang lainnya. Untuk menguji ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan adanya pendekatan

scatter plot diantara suatu prediksi variabel yang terkait antara residualnya. Hasil uji heteroskedastisitasn yaitu sebagai berikut:



Gambar 3
Grafik Scatter Plot
Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan gambar 3 diatas pada uji heteroskedastisitas dapat dilihat hasilnya menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, Grafik scatter plot terdiri dari titik-titik spasi acak yang berada di atas atau di bawah 0 pada sumbu Y (Regression Studentized Residual). asumsi terpenuhi, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga penggunaan model regresi praktis.

Uji Autokorelasi

Dalam model regresi, uji autokorelasi berusaha untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara kesalahan perancu pada periode t dengan kesalahan perancu pada periode t-1. Variabel error-term ini tidak acak dan dikenal sebagai autokorelasi ketika variabel error-term dalam satu periode berkorelasi dengan variabel error-term di periode lain. Ketika pengamatan terus terhubung satu sama lain secara berurutan, autokorelasi dapat terjadi. Berikut temuan uji autokorelasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,919a	0,844	0,833	0,36092	1,926

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 pada uji autokorelasi diatas dapat dilihat hasil autokorelasi menunjukkan tidak adanya autokorelasi, sama hasil dari data diatas menunjukkan nilai Durbin Watson 1,926 yang berarti berada antara 1,5 - 2,46. Oleh maka sebab itu data diatas tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan sejumlah variabel independen dalam satu model prediksi. Model analitis ini menentukan besarnya pengaruh faktor-faktor independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linier berganda juga digunakan untuk menguji bagaimana pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus mempengaruhi belanja modal. Hasil uji analisis regresi linier berganda adalah:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	5,480	7,776			0,705	0,485
Pendapatan Asli Daerah	0,651	0,154	0,786		4,227	0,000
Dana Alokasi	0,286	0,425	0,117		0,673	0,505
Dana Alokasi	0,443	0,245	0,463		2,531	0,028

Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel 5 diatas hasil regresi linier berganda yaitu:

$$BM = 5,480 + 0,651 \text{ PAD} + 0,286 \text{ DAU} + 0,443 \text{ DAK} + e$$

Dengan berdasarkan model persamaan diatas maka dapat dijelaskan: (1) Nilai konstanta diketahui senilai 5,480 bisa diartikan Nilai variabel belanja modal 5.480 variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus semuanya sama dengan 0. (2) Koefisien Regresi Variabel Pendapatan Asli Daerah besarnya nilai variabel Pendapatan Asli Daerah yaitu 0,651. Dan nilai dinyatakan apabila nilainya menunjukkan ke arah positif (searah) diantara variabel PAD dengan variabel BM Provinsi Jawa Timur. Apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dengan nilai 0,651 maka Belanja Modal juga akan mengalami kenaikan 0,651. Oleh sebab itu besarnya nilai PAD yang didapatkan maka semakin besar pula nilai BM yang dikeluarkan. (3) Koefisien Regresi Variabel Dana Alokasi Umum nilai variabel Dana Alokasi Umum yaitu 0,286. Dan nilai dapat dinyatakan apabila nilainya menunjukkan ke arah positif (searah) diantara variabel DAU dengan variabel BM Provinsi Jawa Timur. Belanja modal juga akan tumbuh 0,286 jika Dana Alokasi Umum meningkat. Oleh sebab itu semakin besar nilai DAU yang didapatkan maka semakin besar pula nilai BM yang dikeluarkan. (4) Koefisien Regresi Variabel Dana Alokasi Khusus nilai variabel Dana Alokasi Khusus yaitu 0,443. Dari nilai dapat dinyatakan apabila nilai menunjukkan ke arah positif (searah) diantara variabel DAK dengan variabel BM Provinsi Jawa Timur. Belanja Modal juga akan tumbuh 0,443 jika Dana Alokasi Khusus. Oleh sebab itu semakin besar nilai DAK yang didapatkan maka akan diikuti kenaikan pula pada nilai BM yang dikeluarkan.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Kapasitas faktor independen untuk menjelaskan variabel dependen diukur dengan koefisien determinasi. (Ghozali, 2018). Hasil uji koefisien determinasi adalah:

Tabel 6
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,919a	0,844	0,833	0,36092

- a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah
- b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6 hasil uji koefisiensi determinasi diatas hasil antara variabel mempunyai kontribusi yang sama besar sama pada hasil R Square yaitu 0,844 atau 84,4%, menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus untuk belanja modal di Pemerintah Kota Jawa Timur. Sisanya 36% hanya 36%, oleh itu diduga dipengaruhi oleh faktor lain dalam model penelitian ini.

Uji Statistik F

Untuk menguji tingkat kedekatan, atau yang bisa disebut keterikatan, antara variabel dependen dan variabel independen, saat ini sedang dilakukan uji kelayakan model (f). Uji F menunjukkan kelayakan model regresi. Anda dapat menentukan apakah suatu model regresi dapat diuji dengan membandingkan nilai Fhitung, Ftabel, dan Sig; khususnya, jika Fhitung > Ftabel atau Sig > 0,05, model dianggap dapat diuji; namun jika Fhitung < Ftabel atau Sig < 0,05 maka model dianggap belum teruji. Hasil dari uji F adalah:

Tabel 7
Hasil Uji F
Anova^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28,982	3	9,661	74,163	,000 ^b
	Residual	5,341	41	0,130		
	Total	34,323	44			

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Hasil estimasi F 74,163 dan nilai Sig 0,000 yang menunjukkan nilai Sig 0,000 < 0,05 menunjukkan semua faktor independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sesuai dengan temuan uji F berdasarkan tabel 7 di atas. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di wilayah Provinsi Jawa Timur, berdasarkan uji F penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji statistik t, menurut Ghozali (2018:98), menunjukkan satu variabel independen atau penjelas dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Berdasarkan premis variabel independen lainnya adalah konstan, uji statistik (t) dijalankan untuk melihat variabel independen dapat berdampak pada variabel dependen. hipotesis diterima jika nilai t estimasi dari analisis regresi akan menunjukkan nilai terkecil = 0,05, namun jika pada nilai probability value uji t akan memperlihatkan 1 (satu) > alpha 5% maka hipotesis yang telah diajukan akan ditolak. Berikut ini adalah hasil uji (t) yaitu:

Tabel 8
Hasil Uji Statistik (t)

		Coefficients				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5,480	7,776		0,705	0,485
	Pendapatan Asli Daerah	0,651	0,154	0,786	4,227	0,000
	Dana Alokasi	0,286	0,425	0,117	0,673	0,505
	Dana Alokasi	0,443	0,245	0,463	2,531	0,028

Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel 8 pada uji (t) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Diketahui hasil pengujian statistik variabel diatas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal berpengaruh sama hasil dari nilai (t) yaitu 4,227 yang memiliki nilai signifikan yaitu $0,000 < 0,05$. Dengan nilai koefisien regresi yang menunjukkan nilai 0,651, oleh itu Belanja modal Pemerintah Kota Provinsi Jawa Timur dipengaruhi variabel pendapatan asli daerah. Hipotesis awal penelitian dapat diterima. (2) H_2 : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan temuan uji statistik terhadap variabel tertentu, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. nilai (t) di atas adalah 0,673 dengan nilai signifikansi $0,505 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi menunjukkan nilai 0,286 maka hipotesis kedua dalam penelitian ini terbukti tidak benar. (3) H_3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Nilai (t) 2,531 dan memiliki nilai signifikansi $0,028 < 0,05$ dapat dilihat dari hasil uji statistik pada tabel di atas. Belanja modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berpengaruh positif terhadap Dana Alokasi Khusus yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi 0,443 dan mengarah ke arah positif. Dalam penyelidikan ini, hipotesis ketiga diverifikasi.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil uji regresi dari tabel 8 menunjukkan hal ini. Antara tahun 2016 dan 2020, pendapatan asli daerah secara langsung mempengaruhi atau meningkatkan belanja modal pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur. Dibuktikan dengan temuan Uji Regresi Pendapatan Asli Daerah yaitu (t) 4,227 yang memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini terlihat dalam laporan APBD yang menyatakan jika Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka Belanja Modal harus mengikutinya. Sehingga dalam penelitian hipotesis pertama ini atau H_1 dinyatakan diterima dan juga memiliki pengaruh positif. Pada hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian yang terdahulu oleh (Nurzen (2016) yang menyatakan di wilayah Jawa Timur, pendapatan asli daerah memiliki dampak yang baik terhadap belanja modal pemerintah kota antara tahun 2016 dan 2020. Artinya jika pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah, peningkatan alokasi Belanja Modal setiap tahunnya, sehingga terjadi pengurangan dana alokasi perimbangan yang biasanya disediakan untuk dapat mengimbangi kesenjangan dalam APBD. Hal ini merupakan yang mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kemandirian keuangan daerah di masa mendatang.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil uji regresi yang disajikan pada tabel 8 menunjukkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh nilainya kecil yang berarti tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap distribusi belanja modal pemerintah kota di Jawa Timur. provinsi dari tahun 2016-2020. Dengan hasil uji regresi Dana Alokasi Umum yaitu nilai (t) 0,673 yang memiliki nilai signifikan yaitu $0,505 > 0,05$. Uang Alokasi Umum menyeimbangkan uang yang diberikan pemerintah federal kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah menggunakan uang untuk membayar pengeluaran daerah, termasuk belanja modal. Sehingga dalam penelitian hipotesis kedua ini atau H_2 dinyatakan ditolak dan juga memiliki pengaruh positif. Penelitian Yawa (2015) dan Mubasiroh (2018), dana alokasi umum memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jawa Timur antara tahun 2016 dan 2020. Hal ini menunjukkan bagaimana investasi modal dilakukan dengan menggunakan uang alokasi umum untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika alokasi belanja modal tidak dapat dinaikkan jika daerah memiliki dana alokasi umum yang kecil, pelayanan kepada masyarakat hanya seadanya dan lebih terfokus pada pembiayaan pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hal ini ditunjukkan dari hasil uji regresi yang disajikan pada tabel 8. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020, DAK secara langsung mempengaruhi atau meningkatkan belanja modal pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur. Secara spesifik nilai (t) 2,531 yang memiliki nilai signifikansi $0,028 < 0,05$ merupakan hasil uji regresi Dana Alokasi Khusus. Dapat dikatakan pemerintah daerah akan memiliki belanja modal yang lebih tinggi semakin banyak Dana Alokasi Khusus yang diterimanya dari pemerintah federal. Dengan cara yang sama belanja modal akan berkurang jika pemerintah daerah mendapat uang alokasi khusus dari pemerintah federal. Sehingga dalam penelitian hipotesis ketiga ini atau H_3 dinyatakan diterima dan juga memiliki pengaruh positif. Pada hasil penelitian oleh Nuarisa (2013) dan Palealu (2013) yang menyatakan DAK berdampak terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota di wilayah Jawa Timur dari tahun 2016 hingga 2020. Artinya, jika pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Dana Perimbangan yang merupakan komponen DAK, peningkatan alokasi Belanja Modal setiap tahunnya, yang mengindikasikan peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah di tahun-tahun mendatang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penulis melakukan penelitian bertujuan agar dapat mengetahui pengaruh dari Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang berada di wilayah Pemerintah Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah terdapat pengaruh positif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Provinsi Jawa Timur. Ditunjukkan adanya pendapat bahwa jika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka anggaran Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan. Hal itu terjadi karena untuk menangani adanya peningkatan kebutuhan yang terdapat pada daerah dan juga membantu pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan serta meningkatkan sarana prasarana. (2) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota wilayah Jawa Timur. Hal itu dibuktikan bahwa jika pihak PEMDA memiliki nilai DAU yang kecil maka biaya yang dikeluarkan hanya untuk pengeluaran rutin seperti belanja gaji atau uang makan pegawai, belanja keperluan kantor ataupun belanja bunga utang dan belanja bantuan sosial. Hal itu artinya jika belanja modal tidak mengalami

peningkatan maka dana alokasi umum pada daerah tersebut mempunyai nilai yang kecil. (3) Dana Alokasi khusus terdapat pengaruh positif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota wilayah Jawa Timur. Ditunjukkan untuk menarik kesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus akan mengalami peningkatan jika disusul terjadinya peningkatan pada biaya anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal. Namun jika biaya Dana Alokasi Khusus rendah maka Belanja modal yang dikeluarkan juga semakin rendah.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menyadari terdapat beberapa kekurangan ataupun keterbatasan dalam penelitian ini sehingga memerlukan perbaikan bagi peneliti selanjutnya. Berikut terdapat dependensi dari penelitian ini yaitu: (1) Riset ini hanya meliputi variabel independen dan dependen yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal. (2) Riset ini hanya meliputi 9 Kota yang terdapat pada Provinsi Jawa Timur dengan total keseluruhan sampel 45. Dan tahun penelitian yang digunakan hanya menggunakan 5 (lima) periode yaitu tahun 2016-2020.

Saran

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Timur diperlukan terus menambah Pendapatan Asli Daerah dengan optimal lalu Pendapatan Asli Daerah akan bertambah setiap tahunnya dan Belanja Modal juga akan bertambah seiring dengan kemadirian pada tiap wilayah. Selanjutnya, pemerintah daerah mengendalikan dengan baik dana transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus hanya untuk pengalokasian ke Belanja Modal. (2) Bagi peneliti berikutnya dianjurkan mencari lebih banyak dan lengkap variabel untuk penelitian agar bervariasi. Variabel yang dapat ditambahkan misalnya seperti dana bagi hasil dan kinerja keuangan sektor publik pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi.: PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2019. Jawa Timur Dalam Angka 2019. (<https://jatim.bps.go.id>). Diakses tanggal 11 Desember 2022.
- Bastian, Indra. 2013. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Dewi, N. W. N., dan M. K. S. Budhi. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 4(1).
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2019. Realisasi APBD 2017-2018. Didapatkan dari <http://djpk.kemenkeu.go.id>
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS*. Edisi Sembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2014. *Teori Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hermawan, A. D. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Malang Raya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2(1): 1-11.
- Juniawan, A. M., dan N. P. S. Suryantini. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(3).

- Kuncoro, M. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Erlan. Jakarta.
- Mohammad, A. S. 2015. Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments in Adamawa State, Nigeria. *Journal of Arts, Science & Commerce*, 6 (3): 67-77.
- Mubasiroh, L. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi daerah Istimewa Jogjakarta. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010-2016.
- Novalista, R. L. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten Atau Kota. Pr. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Nuarisa, A. S. 2013. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 2 (1).
- Nurzen, M. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5 April.
- Palealu, M. A. 2013. Pengaruh Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Emba*, 1(4): 1189-1197.
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah. 6 Maret 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322. Jakarta.
- Rahmawati, R., dan Achmad, T. 2018. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja di D.I Yogyakarta Tahun 2012-2016. *Jurnal Kajian Bisnis*, 26 (2).
- Rifai, R. A. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Journal Katalogis* 5 (7): 169-80.
- Sabdanews. 2019. Struktur APBD TA 2020 Jadi Sorotan Tajam Fraksi-Fraksi DPRD Jatim. Sabdanew.Com. <https://sabdanews.com/2019/11/22/apbd-ta-2020-sebesar-rp-35-triliun-disahkan-dprd-jatim/>.
- Sari. P., dan Ningsih. N. H. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD, DAK, dan DAU Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12.
- Sholikhah, I., dan Wahyudin, A. 2014. Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Siregar. B. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sulistiyorini, E. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Simki-Economic*, 2(2).
- Suparmoko. 2013. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktik*. Edisi Keenam. BPFE. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Penelitian Tindakan dan Penelitian Evaluasi*. Edisi Keenam. CV Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.